

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU TAHUN 2017**

Musnawati ,Yesi Mutia Basri & Nasrizal

**Magister Akuntansi FEB Universitas Riau
E-mail : musnawati@yahoo.co.id**

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the effect of planning, administration, human resources, procurement of goods and services, and partially against Regulatory delays the absorption of Budget Work Unit of the Ministry of Religion Riau Province Year 2017. The population in this research is the Satker who was involved in the management of the budget in the region of Riau Province Ministry of Religion as much as 73 satker with number of respondents 161 people consisting of officials of Commitment Maker (PPK), Treasurer of expenditure (BP) and Planning Officers. A method of data analysis in this study using Multiple Linear Regression models. The results showed that the planning, administration, human resources, procurement of goods and services and the Regulation effect partially and significantly to Delay absorption of the Budget.

Key words: *Planning, administration, human resources, procurement of goods and services, regulation, delay the absorption of budget*

PENDAHULUAN

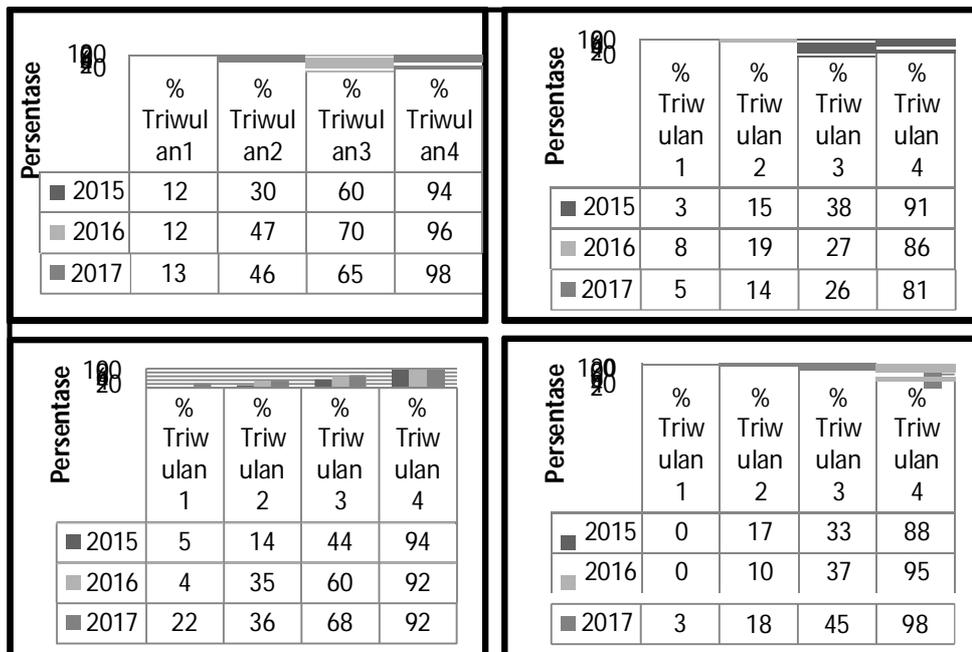
Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Keterlambatan penyerapan anggaran belanja Kementerian dan Lembaga dianggap sebagai buruknya kinerja pemerintah. Keterlambatan penyerapan anggaran belanja akan menghambat terciptanya *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi (Republik Indonesia,2014). Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri, Keterlambatan penyerapan anggaran belanja memiliki pola penyerapan anggaran rendah di Triwulan I dan tinggi di Triwulan IV yang bersifat *procyclical*, belum *countercyclical* sesuai tujuan kebijakan fiskal (Republik Indonesia, 2015).

Keterlambatan penyerapan anggaran belanja disebabkan adanya kekhawatiran Kementerian/Lembaga masalah efisiensi belanja sebesar 16 triliun rupiah. Kementerian/Lembaga mengidentifikasi belanja barang dari setiap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan (*self blocking*) (Jefriando, 2017). Banyak lembaga yang akhirnya menahan belanja sedangkan pemerintah mendorong belanja barang dan belanja modal di akhir tahun, sedangkan belanja modal merupakan komponen terpenting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya *self blocking* ini realisasi anggaran rendah di awal semester dan tinggi di akhir semester.

Menurut Bappenas (2017), Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam mendapatkan pinjaman luar negeri dari International Development Bank (IDB) dalam kegiatan *The Support to Development of Islamic*

Higher Education Project dengan nilai pinjaman USD 123,8 juta. Penarikan sampai Triwulan III Tahun Anggaran 2017 USD 1,2 juta, pinjaman yang belum ditarik 122,6 juta sehingga realisasi Tahun Anggaran 2017 masih rendah baru mencapai 1,1%. Dari data tersebut diatas, alokasi anggaran dari *The Support to Development of Islamic Higher Education Project* cukup besar namun realisasi anggaran masih rendah sehingga menimbulkan keterlambatan penyerapan anggaran akibatnya manfaat dari pinjaman belum dapat dirasakan bagi masyarakat luas.

Keterlambatan penyerapan anggaran dapat dilihat pada realisasi anggaran Kementerian Agama secara nasional dari Triwulan I hingga Juni Tahun 2017 mencapai 10,53% ditingkat pusat. Penyerapan di tingkat daerah mencapai 31,80%. Serapan secara nasional mencapai 30,52% menurut data Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Kementerian Keuangan(Admin,2017). Keterlambatan penyerapan anggaran ini menunjukkan penyerapan anggaran Triwulan I dan Triwulan II rendah, baik Kementerian Agama tingkat pusat maupun Kementerian Agama yang ada di daerah-daerah. Persentase realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial Satker Kanwil Kemenag Provinsi Riau Tahun 2017 dapat dilihat pada 4 Grafik sebagai berikut: masing Persentase Realisasi Belanja Pegawai, Realisasi Belanja Modal, Realisasi Belanja Barang, dan Realisasi Belanja BanSos.



Grafik 1 s.d 4
Persentase Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial

Grafik 1. Grafik 2, Grafik 3 dan Grafik.4 menunjukkan persentase realisasi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial (bansos). Belanja barang, belanja modal dan belanja bansos menunjukkan persentase realisasi rendah di Triwulan I dan Triwulan II, meningkat di Triwulan III dan Triwulan IV. Rata-

rata persentase Triwulan I sebesar 5,5%, Triwulan II sebesar 19,7%, Triwulan III sebesar 42% dan Triwulan IV sebesar 90,7%.

PMK NO. 197/PMK.05/2017, Rencana Penarikan Dana (RPD) adalah rencana penarikan kebutuhan dana yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Target penarikan dana tingkat satker ditetapkan berupa persentase yang diperoleh dari nominal perkiraan Rencana Pelaksanaan Kegiatan per bulan dibagi total nominal perkiraan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran (Republik Indonesia, 2017). Menurut Rosyandi (2017) Perencanaan kas merupakan tindak lanjut dari RPD yang tercantum dalam halaman III DIPA. Halaman III DIPA berisi informasi RPD. RPD dirinci per jenis belanja (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan lain-lain) dan per bulan. Halaman III DIPA selain dibagi rata ke dalam dua belas bulan, halaman III DIPA dibagi berdasarkan trend penyerapan tahun sebelumnya. Hasilnya adalah rencana penarikan dana yang lebih rendah di awal tahun dan awal tiap triwulan. Sebaliknya, di tiap akhir triwulan apalagi akhir tahun, ditemukan rencana pencairan dana yang cukup tinggi.

TINJAUAN TEORITIS

Menurut Bawono (2014) Keterlambatan Penyerapan Anggaran adalah penyerapan anggaran yang rendah pada Kementerian/Lembaga karena tidak berhasil melaksanakan keseluruhan program dengan baik. Rendahnya tingkat penyerapan anggaran setiap triwulan dibandingkan dengan proporsi waktu dalam satu periode tahun anggaran (Miliasih, 2012). Penyerapan anggaran yang rendah diikuti dengan output dan outcome yang rendah, sebaliknya penyerapan anggaran yang tinggi bila diiringi dengan output dan outcome yang rendah menunjukkan kegiatan yang kurang efektif (Muhsin, 2014).

Perencanaan adalah inti manajemen (Notoatmodjo, 2003). Aspek perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran yang akan disajikan berdampak pada tidak akan berjalannya program kerja dengan baik (Arif&Halim, 2013). Proses perencanaan yang baik dapat meminimalisir deviasi antara kebutuhan dengan jenis dan jumlah kegiatan yang dicantumkan dalam RKA-KL (Yunarto, 2011). Perencanaan anggaran yang tidak matang akan menyebabkan anggaran harus direvisi (Carsidiawan, 2009). Penelitian Kirnanda (2016) bahwa perencanaan anggaran dilaksanakan tanpa melakukan evaluasi terlebih dahulu. Penelitian Widianingrum et. al. (2017), Variabel pembentuk faktor perencanaan adalah (1) perencanaan anggaran kas yang kurang efektif; (2) perencanaan dalam penentuan akun/kode rekening belanja yang tidak sesuai dengan perencanaan. Penelitian Putri (2017), Perencanaan anggaran merupakan acuan dalam proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Dari berbagai teori dan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Maka hipotesis (H1) yang diajukan yaitu :

H1: Perencanaan berpengaruh Terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja

Administasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu (Siagian, 2014). Data pendukung yang tidak lengkap pada tahap akhir kegiatan penelaahan RKAK/L berakibat anggaran kegiatan diblokir/dibintang (Yunarto, 2011). Tidak disiplinnya penyampaian laporan keuangan ke KPPN (rekonsiliasi) menyebabkan satker terkena sanksi penundaan (Carsidiawan, 2009). Penyerapan anggaran rendah dipengaruhi oleh keterlambatan petunjuk teknis (Juknis) dari Pemerintah Pusat atau Kementerian terkait (Salam, 2015). Kesalahan menentukan jenis belanja dalam DIPA sehingga kegiatan tidak dapat segera untuk dilaksanakan (Muchsin, 2011).

Ketidakkelengkapan Term of Reference (TOR) mempengaruhi hasil penelaahan pada nilai alokasi yang ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan menjadi tidak tepat dan tidak sesuai dengan kondisi riil (Yunarto, 2011). Penelitian Herriyanto (2012), pembentuk faktor administrasi adalah salah penentuan akun. Penelitian Widianingrum et. al., (2017). Item pembentuk faktor administrasi adalah penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tidak melalui survey pasar yang memadai menyebabkan nilai alokasi anggaran kegiatan menjadi tidak tepat. Penelitian Julian (2017) mengindikasikan bahwa perlu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang sering terjadi terkait dengan dokumen anggaran seperti perubahan tentang kode akun belanja. Penelitian Kirnanda (2016) variabel administrasi proses administrasi yang dilaksanakan di SKPD masing-masing belum berjalan baik. Penelitian Anfujatin (2016) adalah SK penunjukan panitia pengadaan terlambat ditetapkan. Dari berbagai teori dan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Administrasi berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Maka hipotesis (H2) yang diajukan yaitu:

H2: Administrasi berpengaruh Terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja

Manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi disebut juga personil, tenaga kerja, atau karyawan (Nawawi, 2017). Birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sedarmayanti, 2009:67). Menurut Salam (2015) menyatakan penyerapan anggaran lambat karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus menerjemahkan lagi proyek-proyek dari APBN dan APBD. Terbatasnya SDM pada panitia pengadaan maka proses pelelangan harus mengikuti ketersediaan waktu tim/panitia lelang (Muchsin, 2011). Penelitian Anfujatin (2016) SDM pengadaan kurang kompeten. Penelitian Herriyanto (2012) SDM pelaksana pengadaan kurang kompeten. Penelitian Kirnanda (2016) menyatakan bahwa aparatur pelaksanaan pengadaan kurang kompeten dalam menangani program/ kegiatan. Dari berbagai teori dan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Maka hipotesis (H3) yang diajukan yaitu :

H3 : Sumber Daya Manusia (SDM) Berpengaruh Terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja

Pengadaan barang dan jasa adalah perolehan barang/jasa oleh organisasi pemerintah atau sektor publik (Uyerra dan Flanagan, 2010). Pengadaan barang/jasa sesuai Keppress 80 tahun 2003 menyatakan bahwa pengguna barang/jasa harus memenuhi persyaratan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah (Carsidiawan, 2009). Pemerintah telah melakukan perubahan cukup signifikan terkait proses pengadaan barang dan jasa (Mokoginta, 2012). Menurut Suryani (2011) lambatnya proses tender dan proyek-proyek pemerintah yang

dilaksanakan diakhir tahun. Penelitian Widianingrum et. al. (2017) bahwa permasalahan terkait ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima/konstruksi yang dibuat dengan spesifikasi dalam dokumen kontrak yang telah disepakati. Penelitian Anfuji (2016) faktor terlambatnya penetapan pemenang, pengulangan lelang, keterlambatan penandatanganan kontrak dan faktor adanya addendum. Penelitian Sudarwati (2014) kurangnya pejabat pengadaan barang dan jasa yang memiliki sertifikat. Dari berbagai teori dan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan Pengadaan Barang dan Jasa akan berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Hipotesis (H4) yang diajukan yaitu :

H4 : Pengadaan berpengaruh Terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja

Pengetahuan tentang peraturan harus diciptakan, diatur, dan dimonitor untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dalam suatu organisasi (Ford, 1989). Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tergantung pada pengetahuan pegawai. Regulasi berarti suatu kegiatan harus diketahui dan dipahami dengan cara tertentu yang akan diatur (Short, 2013). Menurut Muchsin (2011) menyatakan adanya perubahan peraturan yang menyebabkan perbedaan persyaratan pencairan sehingga mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran. Menurut Salam (2015) menyatakan rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh lambatnya penetapan APBD yang baru dilakukan bulan April 2015. Menurut penelitian Julian (2017), bahwa perubahan peraturan/kebijakan yang sering terjadi disesuaikan dengan kebutuhan satuan kerja. Penelitian Juliani (2014), terkait pengadaan barang/jasa karena semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian Widianingrum et. al. (2017) tidak adanya mekanisme reward dan punishment dalam pengelolaan keuangan pada SKPD. Dari berbagai teori dan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Regulasi berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Maka hipotesis (H5) yang diajukan yaitu :

H5 : Regulasi berpengaruh Terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Satker yang terlibat dalam pengelolaan anggaran di wilayah Kemenag Prov. Riau sebanyak 73 satker. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampling Jenuh/Sensus. Sampling Jenuh/Sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2016). Responden dalam penelitian ini adalah 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 2) Bendahara Pengeluaran (BP) atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), 3) Pegawai Perencanaan. Menggunakan alat bantu aplikasi software *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)*. Hasil analisis regresi berupa konstanta dan koefisien untuk tiap-tiap variable independen menghasilkan model regresi penelitian dirumuskan dengan persamaan berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \epsilon_1$$

Keterangan :

Y:Keterlambatan Penyerapan Anggaran

α :Konstanta

β_1 :Koefisien RegresiPerencanaan

- β_2 :Koefisien Regresi Administrasi
- β_3 :Koefisien Regresi SDM
- β_4 :Koefisien Regresi Pengadaan Barang/Jasa
- β_5 :Koefisien Regresi Regulasi
- X1:Perencanaan
- X2:Administrasi
- X3:Sumber Daya Manusia
- X4:Pengadaan Barang/Jasa
- X5:Regulasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1
Analisis Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Deviation
Perencanaan (X1)	22.62	2.228
Administrasi (X2)	21.68	2.504
SDM (X3)	21.17	2.732
Pengadaan (X4)	18.79	3.186
Regulasi (X5)	21.37	2.471
Keterlambatan(Y)	23.94	1.383

Sumber : Olahan Data Primer

Pada Tabel 1 nilai instrument Y skor maximum 25,00 nilai mean 23,94. Instrument X1 minimum 14,00 dan maximum 25,00 nilai mean 22,62. Instrument X2 sebesar 12,00 dan maximal 25,00 sehingga nilai mean total skor jawaban 21,68. Nilai Instrumen X3 sebesar 13,00 dan skor maximal sebesar 25,00 nilai mean total 21,17. Nilai instrument X4 skor terendah 10,00 dan skor tertinggi sebesar 25,00 nilai mean total 18,79 dengan standar deviasi 3,186. Nilai instrument X5 skor terendah 13,00 dan skor tertinggi 25,00 nilai mean total skor jawaban sebesar 21,37 dengan standar deviasi 2,471.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan Uji Statistic Cronbach's Alpha, jika nilai Alpha > 0,70 maka kontruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel adalah reliable (Sujarweni, 2016). Seperti terlihat pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Minimum	Keputusan
Y	0,747	0,70	Reliabel
X1	0,739	0,70	Reliabel
X2	0,756	0,70	Reliabel
X3	0,768	0,70	Reliabel
X4	0,811	0,70	Reliabel
X5	0,765	0,70	Reliabel

Sumber : Olahan Data Primer

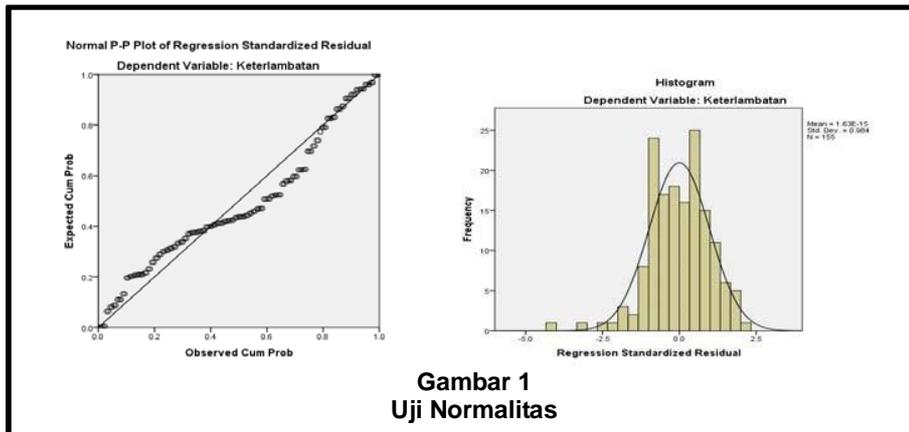
Alat uji yang digunakan adalah korelasi Pearson yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap-tiap item pertanyaan dengan total skor variabel. Kaidah pengambilan keputusannya adalah bila ada hubungan antara item pertanyaan dengan total pertanyaan secara keseluruhan dan besarnya nilai korelasi di bawah taraf signifikan (α) 0,05, maka kuesioner dinyatakan valid. Seperti yang terlihat pada Tabel 3.

**Tabel 3
Hasil Uji Validitas**

		R Hitung	R Tabel	Keputusan
Y	1	0,536	0,133	Valid
	2	0,512	0,133	Valid
	3	0,654	0,133	Valid
	4	0,447	0,133	Valid
	5	0,382	0,133	Valid
X1	1	0,470	0,133	Valid
	2	0,586	0,133	Valid
	3	0,624	0,133	Valid
	4	0,624	0,133	Valid
	5	0,575	0,133	Valid
X2	1	0,574	0,133	Valid
	2	0,250	0,133	Valid
	3	0,342	0,133	Valid
	4	0,417	0,133	Valid
	5	0,431	0,133	Valid
X3	1	0,494	0,133	Valid
	2	0,536	0,133	Valid
	3	0,570	0,133	Valid
	4	0,520	0,133	Valid
	5	0,322	0,133	Valid
X4	1	0,496	0,133	Valid
	2	0,465	0,133	Valid
	3	0,467	0,133	Valid
	4	0,478	0,133	Valid
	5	0,441	0,133	Valid
X5	1	0,030	0,133	Valid
	2	0,602	0,133	Valid
	3	0,578	0,133	Valid
	4	0,454	0,133	Valid
	5	0,424	0,133	Valid

Sumber : Olahan Data Primer

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, grafik Histogram dan grafik Normal Probability Plot (Ghozali, 2016:158). Metode yang paling baik adalah melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.



Gambar 1
Uji Normalitas

Hasil Uji Multikolinieritas

Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10, maka dinyatakan tidak ada korelasi sempurna antar variabel independen dan sebaliknya (Ghozali 2012:105). Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* masing-masing variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai besar dari 0,10 dan nilai *VIF* kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala multikolinieritas.

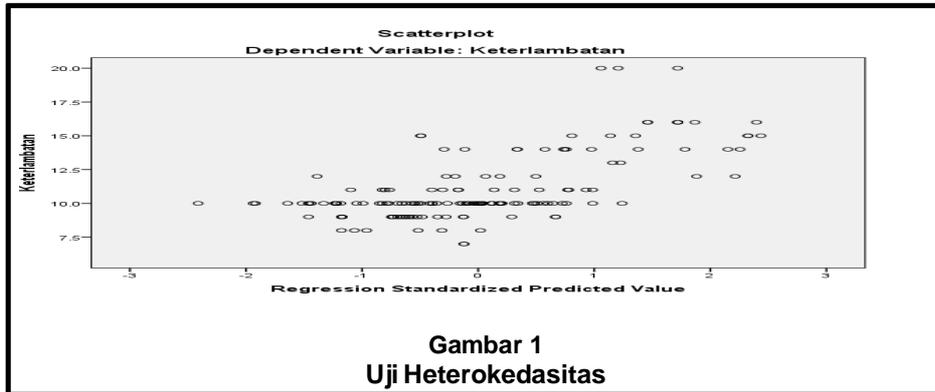
Tabel 4
Uji Kolmogorov – Smirnov

Model	Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Tolerance	VIF
(Constant)	10.535	.750		
Perencanaan	.279	.039	.540	1.851
Administrasi	.082	.034	.562	1.779
SDM	.076	.028	.715	1.398
Pengadaan	.053	.022	.818	1.222
Regulasi	.127	.031	.702	1.425

Sumber : Olahan Data Primer

Hasil Uji Heterokedasitas

Berdasarkan grafik Scatterplot diatas terlihat bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengidentifikasikan bahwa tidak terjadi Heterokedastisitas dalam model regresi. Hal ini dipertegas dengan uji statistic berupa uji Glejser, yaitu melakukan regresi nilai absolute residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2016:137). Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi residual tiap-tiap variabel independen, seperti ditunjukkan pada tabel 4.15, berada pada rentang 0.054 – 0,697 dan lebih besar dari nilai signifikansi yang disyaratkan (0,05). Tidak ada satupun variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen nilai absolute residual (AbsUt). Artinya, model regresi memiliki varian residual yang konstan (homoskedastisitas). Sebagai kesimpulan berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.



Hasil Analisis Regresi Berganda

Hipotesis yang diuji adalah Perencanaan (X1), Administrasi (X2), Sumber Daya Manusia (X3), Pengadaan Barang dan Jasa (X4) dan Regulasi (X5) berpengaruh terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja (Y). Terlihat pada Tabel 5.

Tabel
5 Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	10.535	.750	14.044	.000
Perencanaan	.279	.039	7.180	.000
Administrasi	.082	.034	2.433	.016
SDM	.076	.028	2.767	.006
Pengadaan	.053	.022	2.412	.017
Regulasi	.127	.031	4.121	.000

Sumber : Olahan Data Primer

Berdasarkan hasil analisa regresi berganda pada tabel diatas dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 10,535 + 0,279X1 + 0,082X2 + 0,076X3 + 0,053X4 + 0,127X5 + e$$

Konstanta (a) bernilai positif sebesar 10,535 menandakan persamaan regresi berganda memiliki hubungan searah, artinya penyerapan anggaran akan meningkat seiring meningkatnya Perencanaan (X1), Administrasi (X2), Sumber Daya Manusia (X3), Pengadaan (X4) dan regulasi (X5).

Hasil Pengujian Hipotesa

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama. Perencanaan berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran belanja

Hasil analisa menunjukkan koefisien konstanta besarnya 10,535; Koefisien Perencanaan (X1) besarnya 0,279. Koefisien tersebut signifikan karena signifikansinya 0,000 lebih kecil dari signifikansi yang ditetapkan harus lebih besar dari 0,05. Jadi persamaan garis regresinya adalah sebagai berikut $Y = 10,535 + 0,279X1$. Berarti apabila Perencanaan (X1) ditingkatkan satu satuan, progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) cenderung meningkat 0,279 satuan pada konstanta 10,535.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua. Administrasi berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran belanja

Koefisien Perencanaan (X2) besarnya 0,082. Signifikansinya 0,016 lebih kecil dari signifikansi yang ditetapkan harus lebih besar dari 0,05. Jadi persamaan garis regresinya adalah sebagai berikut $Y = 10,535 + 0,082X2$. Persamaan regresi ini bahwa apabila Perencanaan (X2) ditingkatkan satu satuan, maka progress Penyerapan Anggaran Belanja (Y) cenderung meningkat 0,082 satuan pada konstanta 10,535.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga. Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran belanja

Koefisien Sumber Daya Manusia (X3) besarnya 0,076. Signifikansinya 0,006 lebih kecil dari signifikansi yang ditetapkan harus lebih besar dari 0,05. Jadi persamaan garis regresinya adalah sebagai berikut $Y = 10,535 + 0,076X3$. Berarti apabila Sumber Daya Manusia (X3) ditingkatkan satu satuan, maka progress Penyerapan Anggaran Belanja (Y) cenderung meningkat 0,076 satuan pada konstanta 10,535.

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat. Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran belanja

Koefisien Pengadaan Barang/Jasa (X4) 0,053. Signifikansinya 0,017 lebih kecil dari signifikansi yang ditetapkan harus lebih besar dari 0,05. Persamaan garis regresinya adalah $Y=10,535 + 0,017X4$. Persamaan regresi mengandung arti bahwa apabila Pengadaan Barang dan Jasa (X4) ditingkatkan satu satuan, maka progress Penyerapan Anggaran Belanja (Y) cenderung meningkat 0,017 satuan pada konstanta 10,535.

Hasil Pengujian Hipotesis Kelima. Regulasi berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran belanja

Koefisien Regulasi (X5) besarnya 0,127. Signifikansinya 0,000. Jadi persamaan garis regresinya adalah $Y = 10,535 + 0,127X5$. Persamaan regresi berarti apabila Pengadaan Barang dan Jasa (X5) ditingkatkan satu satuan, maka progress Penyerapan Anggaran Belanja (Y) cenderung meningkat 0,127 satuan pada konstanta 10,535.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil analisis menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Belanja Satker Kanwil Kemenag Provinsi Riau Yaitu Perencanaan, Administrasi, Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa dan Regulasi. Faktor Perencanaan, Satker melaksanakan kegiatan jarang melihat rencana/jadwal yang tercantum pada Halaman III DIPA; Pengajuan penyusunan anggaran yang tidak disertai Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Faktor Administrasi, Penyusunan dan penelaahan/penelitian dokumen anggaran berdekatan; Pejabat/pegawai pengelola keuangan kurang memahami administrasi dan mekanisme pembayaran/pembebanan APBN. Faktor Sumber Daya Manusia, Aparatur pelaksana pengadaan kurang berkompeten dalam menangani program/kegiatan; Adanya rangkap tugas dalam jabatan panitia pengadaan maupun jabatan lainnya;

Keterbatasan pelaksana pengadaan yang bersertifikat. Terdapat kebiasaan seperti menunda pekerjaan, tidak disiplin, mengerjakan pekerjaan di menit terakhir. Pejabat/Pengelola keuangan sering mengalami mutasi. Faktor Pengadaan Barang/Jasa, pengguna barang/jasa harus memenuhi persyaratan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah; Jadwal pelaksanaan lelang yang disusun tidak realistis atau tidak sesuai kebutuhan; Kesulitan dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan HPS tidak ditentukan berdasarkan keahlian dan tidak melalui survey pasar. Faktor Regulasi, Perubahan peraturan/kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan tidak disesuaikan dengan kebutuhan Satker; Perubahan peraturan/kebijakan baru kurang disosialisasikan sampai ke satker-satker yang berada di daerah-daerah; Ketidakjelasan peraturan/ kebijakan teknis suatu kegiatan dapat membingungkan pelaksana kegiatan di Satuan Kerja.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Pertama, objek penelitian terbatas pada Satker Kementerian Agama Provinsi Riau sehingga kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini tidak dapat digeneralisasi pada Kementerian Agama se Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencakup wilayah yang lebih luas tidak hanya Satuan Kerja Kementerian Agama Provinsi Riau tetapi seluruh wilayah Sumatera agar kesimpulan yang diambil dapat digeneralisasi. Kedua, penelitian menggunakan Data Primer melalui kuesioner yang menyebabkan jawaban kuesioner berindikasi bias. Melakukan penelitian Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer berasal dari jawaban kuesioner yang diberikan oleh responden dan disertai *in dept interview*. Data Sekunder berasal dari realisasi anggaran dari masing-masing satker yang dikelola oleh Online Monitoring System Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN). Ketiga, penelitian ini terkait pelaksanaan penyerapan anggaran. Responden dari penelitian ini berasal dari pihak internal satker yang terbatas pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Penyusunan Anggaran sehingga rentan terhadap pemberian jawaban tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Menambah responden eksternal seperti responden yang berasal dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), kalangan akademisi dan pemangku kepentingan lainnya. Keempat, penelitian ini belum mengeksplorasi variabel-variabel yang mungkin mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran. Dilihat dari nilai R square sebesar 0,685 masih ada 32% variabel independen lainnya yang bisa mempengaruhi variabel dependen. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain diluar dari variabel yang telah diteliti pada penelitian ini seperti trend penyerapan anggaran dan revisi anggaran belanja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anfujatin. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban*. DJA, Jurnal Administrasi Publik Juni 2016, Vol. 14 No.1, hal. 1-18.
- Arif, E. & A. Halim. 2013. *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011*. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, 25-28.

- Admin. 2017. *Sekjen Kemenag Minta KPA Percepat Pelaksanaan Serapan Anggaran*. <http://nusakini.com/news/sekjen-kemenag-minta-kpa-percepat-pelaksanaan-serapan-anggaran>.
- Bappenas. 2017. *Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Triwulan III Tahun 2017*. Jakarta.
- Bawono, Rangga, Icut, Halim, Abdul. 2014. *Kas Mengganggu: Dilema Antara Penyerapan, Resiko, dan Tuntutan Hukum dalam Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Penerbit Salemba Empat.
- Carsidiawan, Didi. 2009. *Mengungkap penyebab Lambatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah*. <http://didicarsidiawan.wordpress.Com>. Diunduh 3/12/2018.
- Ford, N. 1989. From Information-to-Knowledge Management: The Role Of Rule Induction and Neural Net Machine Learning Techniques in Knowledge Generation. *Journal of Information Science*, 15 (4-5), 299-304.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi-8. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herriyanto, Hendris. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian /Lembaga di Wilayah Jakarta. *Tesis*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Program Studi Perencanaan dan Kebijakan Publik. Universitas Indonesia.
- Jefriando, Maikel. DetikFinance. 2017. *Jokowi Perintahkan Menteri Hemat Anggaran Rp 16T*. Jakarta. 2017. <https://m.detik.com/jokowi-perintah-menteri-hemat-anggaran-16T>. diunduh 1 januari 2019.
- Julian, Sembiring, Hendri. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. *Tesis*. Medan : Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Juliani, Dian. 2014. Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 11 No. 2 Desember 2014. Universitas Gajah Mada.
- Kirnanda, Agus. 2016. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Binjai Dengan Perubahan Anggaran Sebagai Variabel Moderating. *Tesis*. Medan : Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Miliasih, Retno. 2012. Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga TA 2010 Di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru. *Tesis*. Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik. Jakarta 2012.
- Mokoginta, Rahfan. 2012. *Solusi Percepatan Penyerapan Anggaran Melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012*.
- Muchsin, M. Noor, Sofan Andi. 2011. *Fenomena Penyerapan Anggaran : Kenapa Akselerasi di Akhir Tahun?*. PFA Bidang APD dan IPP.
- Muhsin, Muhammad, Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Penyerapan Anggaran dalam Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah)*. Penerbit Salemba Empat.

- Nawawi, Hadari H. 2002. *Kepemimpinan Yang Efektif*. Yogyakarta, Gajah Mada.
- Putri, Ranisa, Mia, Kadek. Yuniarta, Adi Gede. Prayudi Aristia Made. 2017. *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran*. *E-Journal Akuntansi Program S1*, Vol:8 No:2 Tahun 2017. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta : Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2017. *Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program Pendidikan Islam Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Tahun Anggaran 2017*. Jakarta : Republik Indonesia.
- Rosyandi, Julianda. 2017. *Manajemen Kas Perbaikan Pola Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran*. diunduh tanggal 1/1/2019.
- Saputra, N. (2020). The Effect Of Organizational Support On Work Satisfaction In Regional Secretariat Employees In Pariaman District. *Ensiklopedia Sosial Review*, 2(1).
- Saepudin. 2010. *Perbedaan Legislasi dan Regulasi*. <http://www.saepudinonline.wordpress.com>.
- Salam, Roy. 2015. *Ini Penyebab Penyerapan Anggaran Rendah*. Jakarta. <http://sp.beritasatu.com/home/ini-penyebab-penyerapan-anggaran-rendah/95107>.
- Sedarmayanti. 2009. *Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan serta Meningkatkan Kinerja Untuk Meraih Keberhasilan*. Cetakan I. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Short, J. L. 2013. *Self-Regulation in the Regulatory Void :Blue Moon” or “Bad Moon”?*. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 649 (1), 22-34.
- Siagian, Sondang, P. 2014. *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sudarwati, Nina. Karamoy, Herman. dan Pontoh, Winston. 2015. *Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja di Akhir Tahun*. Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cetakan ke-8, April 2016, Alfabeta, Bandung.
- Uyarra, E. and K. Flanagan 2010. *Understanding the Innovation Impacts of Public Procurement*, *European Planning Studies*, 18(1),123-143.
- Widyaningrum, Desik. Kustono, Sri Alwa. Suryaningsih, Ika Barokah. 2017. *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kabupaten Situbondo*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*.
- Yunarto, Imam. 2011. *Memahami Proses Penganggaran Untuk Mendorong Optimalisasi Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta : Paris Review.